

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan terhadap teknologi informasi (TI) yang mengalami peningkatan yang pesat membawa pengaruh dalam segala aspek. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Rahmana, 2009).

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintahan digital, atau sistem informasi pemerintahan transformasi adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan program pemerintahan berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Setiawan & Irawan, 2017).

Implementasi *e-government* di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dimana Diperlukannya pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi yang ditunjang oleh kemajuan ekonomi digital sehingga menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung salah satu sasaran Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatkan peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Barat yang berperan dalam memfasilitasi kebijakan, mengakselerasi, dan menjalankan pelayanan dengan optimal untuk menghadirkan ekosistem baru industri dan perdagangan yang mampu bersaing di era digital.

Agar pelaksanaan *e-government* dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan dengan tingkat kematangan (*maturity level*) pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Nabilah, 2021).

Namun demikian, hasil pengembangan *e-government* menunjukkan *maturity level* yang relatif rendah dan kesenjangan yang tinggi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 pada 616 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, indeks SPBE Nasional mencapai nilai 1,98 dengan predikat Cukup dari target indeks SPBE sebesar 2,6 dari 5 (lima) level dengan predikat Baik. Ditinjau dari capaian Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, rata-rata indeks SPBE Instansi Pusat sebesar 2,6 dengan predikat Baik, sementara rata-rata indeks SPBE Pemerintah Daerah sebesar 1,87 dengan predikat Cukup. Ditinjau dari sebaran capaian target, 13,3% Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencapai atau melebihi target indeks SPBE 2,6, sedangkan 86,7% belum mencapai target indeks SPBE 2,6. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengembangan *e-government* yang telah berjalan (Nabilah, 2021).

Oleh karena itu, perlu adanya analisa dan evaluasi untuk menjamin keberlangsungan penerapan *e-government* pada Pemerintah Daerah khususnya bidang perindustrian sehingga dapat mencapai visi, misi, dan tujuan Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan untuk penelitian ini adalah “Perancangan analisis dan *blueprint* Arsitektur *Enterprise* dibidang perindustrian Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan untuk sasaran ‘Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jawa Barat’”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan *blueprint* Arsitektur *Enterprise* pada bidang Perindustrian Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi untuk sasaran ‘Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jawa Barat’”

I.4 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Tahap perancangan arsitektur akan difokuskan untuk domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan (Tidak termasuk Infrastruktur dan Keamanan).
2. Perancangan dilakukan bertujuan untuk merelaisasikan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ke-4, yaitu ‘Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan’.

3. Penelitian akan difokuskan kepada bidang perindustrian Provinsi Jawa Barat yang membawahi sasaran ‘Meningkatkan Peran Industri dan Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

1. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi seputar sistem pemerintah berbasis elektronik. Menghasilkan nilai tingkat kematangan dari SPBE serta dapat digunakan untuk referensi pada penelitian berikutnya yang terkait evaluasi SPBE. bergerak dalam sistem informasi pendidikan tinggi, penelitian ini bermanfaat dalam menjelaskan pendekatan yang paling tepat dalam membangun upaya digitalisasi aktivitas akademis.
2. Membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam analisis dan perancangan Arsitektur Pemerintah Berbasis Elektronik hingga dihasilkan blueprint pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan (Tidak termasuk Infrastruktur dan Keamanan) untuk melengkapi dokumentasi Arsitektur SPBE dalam rangka mencapai target pada aspek kebijakan layanan yang ada pada domain kebijakan berdasarkan indikator pencapaian pada Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi SPBE.

I.6 Sistematika Penulisan

Pada penyusunan tugas akhir ini terbagi atas beberapa pembahasan dengan membaginya ke dalam 6 bab. Pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang ada serta solusi yang akan diberikan untuk penyusunan arsitektur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori mengenai SPBE, Penerapan *e-government* di Indonesia, Perbandingan penerapan *e-government* dinegara lain, dasar teori *Enterprise Architecture* beserta perbandingan framework, yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir serta teori-teori yang berkaitan dengan topik dan fokus penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang teknis pelaksanaan pembangunan arsitektur dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Perindustrian Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Barat yang dikorelasikan dengan keilmuan yang didapatkan saat perkuliahan.

BAB IV OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan objek yang akan dijadikan penelitian dalam hal ini DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat terkhusus pada bidang Perindustrian. Dimana didalam nya mencakup gambaran high-level organization yang terdiri dari visi, misi, uraian tugas tiap fungsi, struktur organisasi, sampai program perangkat daerah. Selain itu indicator kinerja utama DISPERINDAG juga dijelaskan Bersama dengan permasalahan serta isu yang ada dalam organisasi.

BAB V ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini terdiri atas dua bagian, yaitu analisis serta perancangan. Analisis berfungsi untuk menganalisis keadaan yang ada saat ini (*existing*) pada bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat. Sedangkan bagian perancangan menjelaskan mengenai arsitektur target bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat

BAB VI VALIDASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Tahapan validasi penelitian yang dilakukan dimana bertujuan memastikan bahwa rancangan yang telah dibuat sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya terjadi pada organisasi, khususnya pada bidang perindustrian DISPERINDAG Provinsi Jawa Barat.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapatkan setelah melaksanakan penelitian dari tugas akhir yang dibuat dan saran untuk melakukan perbaikan selanjutnya.